Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA SEA INDUK KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA

Aviva Ayudia Monintja[1], Welson Yappi Rompas [2], Novie R. A. Palar[3]
[123] Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available online Januari , 2026

avivamonintja06@gmail.com,
yappirompas@unsrat.ac.id,
noviepalar@unsrat.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini juga menggunakan teori modernisasi Inkeles & Smith sebagai kerangka analisis untuk memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Desa Sea Induk belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Meskipun perbaikan pada beberapa ruas utama berdampak positif terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, masih terdapat ketimpangan pembangunan di lorong-lorong kecil dan wilayah tertentu yang belum mendapatkan perbaikan infrastruktur. Dari aspek lingkungan, keterbatasan sistem drainase menyebabkan genangan air dan mempercepat kerusakan jalan, terutama saat musim hujan. Selain itu, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan belum mencakup keterlibatan aktif dalam perencanaan serta pemeliharaan. Secara keseluruhan, pembangunan jalan di Desa Sea Induk belum menunjukkan ke arah yang berkelanjutan, karena masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai modernisasi sebagaimana dikemukakan oleh Inkeles & Smith belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pembangunan di tingkat desa.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Infrastruktur Jalan; Modernisasi

A B S T R A C T

This study aims to examine road infrastructure development in Sea Induk Village through the application of sustainable development principles across social, economic, and environmental dimensions. The study applies the modernization theory of Inkeles and Smith as an analytical framework to understand the level of community participation in the development process. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation involving village government officials and local residents. The results indicate that road infrastructure development in Sea Induk Village has not yet been fully optimal or sustainable. Although improvements to several main road sections have positively affected community mobility and economic activities, development disparities remain in small alleys and certain areas that have not received adequate infrastructure improvements. From an environmental perspective, limited drainage systems have caused water accumulation and accelerated road damage, particularly during the rainy season. In addition, community

*Corresponding author
E-mail addresses: avivamonintja06@gmail.com,

participation remains limited to the implementation stage and has not extended to active involvement in planning and maintenance. Overall, road development in Sea Induk Village has not yet demonstrated a fully sustainable direction, as it continues to face challenges related to infrastructure equity, environmental management, and community empowerment. These findings suggest that the modernization values proposed by Inkeles and Smith have not been fully implemented in village level development practice.
***Keywords**: Sustainable Development; Road Infrastructure; Modernization*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan wilayah. Infrastruktur, khususnya jalan, memiliki fungsi strategis sebagai sarana penghubung antarwilayah yang menentukan kelancaran mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi (Grigg, 1988; Kodoatie, 2005). Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, terutama di daerah pedesaan.

Pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Di wilayah desa, jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perdagangan lokal, dan akses pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa memiliki korelasi langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah (Todaro & Smith, 2011).

Dalam konteks kebijakan publik, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara sistematis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kapasitas pelaksana, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pengelolaan pembangunan (Nugroho, 2017; Subarsono, 2016). Lemahnya salah satu aspek tersebut seringkali menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak berjalan optimal atau tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah yang terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara geografis, Desa Sea Induk memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Namun, berdasarkan kondisi empiris di lapangan, pembangunan infrastruktur jalan di desa ini masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi kualitas jalan, pemerataan pembangunan, maupun keberlanjutan pemeliharaan.

Permasalahan yang sering muncul meliputi kondisi jalan yang belum seluruhnya layak, keterbatasan anggaran pembangunan, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pembangunan, sehingga hasil pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek tata kelola pemerintahan desa.

Pembangunan desa pada hakikatnya menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam mengelola pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola pembangunan melalui perencanaan partisipatif dan pemanfaatan dana desa. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Sutoro Eko, 2014; Dwiyanto, 2011).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa seringkali tidak optimal karena lemahnya perencanaan, rendahnya transparansi, serta kurangnya pengawasan pelaksanaan pembangunan (Sihombing, 2019; Kurniawan, 2020). Kondisi ini juga

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



diperkuat oleh temuan yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam setiap tahapan pembangunan (Rukmana, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta menilai sejauh mana pembangunan jalan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur pedesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, serta mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap realitas sosial melalui penggalian data secara langsung dari lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari program pembangunan desa. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan di Desa Sea Induk masih menunjukkan adanya permasalahan yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatannya oleh masyarakat.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap proses pembangunan infrastruktur jalan. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah desa, perangkat pelaksana pembangunan, serta masyarakat yang secara langsung merasakan dampak pembangunan jalan. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam, akurat, dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur jalan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik jalan, proses pembangunan, serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan infrastruktur tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen perencanaan desa, laporan pelaksanaan pembangunan, foto kegiatan, serta arsip lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta makna yang berkaitan dengan proses pembangunan infrastruktur jalan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang menggambarkan kondisi pembangunan secara utuh.

*Corresponding author
E-mail addresses: avivamonintja06@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan memiliki posisi strategis karena menjadi sarana utama mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam mekanisme pembangunan desa. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun rencana pembangunan melalui musyawarah desa dengan melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jalan telah mengacu pada dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Akibatnya, pembangunan jalan dilakukan secara bertahap dan belum mencakup seluruh wilayah yang membutuhkan perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan, pembangunan jalan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal serta pengawasan dari aparat desa. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan pembangunan masih bervariasi. Beberapa ruas jalan telah dibangun dengan baik, namun terdapat pula bagian jalan yang belum memenuhi standar kualitas karena keterbatasan material dan anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kapasitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Kodoatie (2005) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta keterpaduan antara aspek teknis dan manajerial.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan desa, termasuk dalam pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sea Induk sudah terlihat dalam beberapa tahapan pembangunan, terutama pada saat musyawarah desa dan pelaksanaan pembangunan secara swadaya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Masyarakat berperan dalam memberikan masukan terkait kebutuhan pembangunan serta terlibat sebagai tenaga kerja dalam proses pembangunan jalan. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya infrastruktur jalan bagi kelancaran aktivitas sehari-hari. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan belum merata. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada pemerintah desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat instrumental, belum sampai pada tahap partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat yang optimal dapat meningkatkan kualitas pembangunan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2011) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan publik.

Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur Jalan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk. Faktor utama adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi dana desa yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dana desa menjadi sumber pembiayaan utama dalam pelaksanaan pembangunan jalan di desa.

Selain itu, komitmen pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung penting. Pemerintah desa menunjukkan keseriusan dalam mengupayakan pembangunan jalan melalui perencanaan yang terarah serta pelaksanaan pembangunan secara bertahap. Dukungan masyarakat, meskipun belum maksimal, juga menjadi modal sosial yang mendukung kelancaran pembangunan.

Faktor lainnya adalah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya infrastruktur jalan dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk ikut terlibat, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun dukungan moral terhadap program pembangunan desa.

Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan sejumlah faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk. Faktor utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas pembangunan serta jangkauan wilayah yang dapat dibangun.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal kemampuan teknis perencanaan dan pengawasan pembangunan, menjadi kendala tersendiri. Aparat desa belum seluruhnya memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengelola proyek pembangunan infrastruktur, sehingga pelaksanaan pembangunan masih sangat bergantung pada pihak luar.

Faktor penghambat lainnya adalah kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Pengawasan yang lemah berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Subarsono (2016) yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.

Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Masyarakat

*Corresponding author
E-mail addresses: avivamonintja06@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Jalan yang telah dibangun mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar akses menuju pusat kegiatan ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan memperlancar distribusi hasil pertanian.

Namun demikian, dampak positif tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau pembangunan jalan secara optimal sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara berkelanjutan dan merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pembangunan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas dan aktivitas masyarakat, tetapi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk memerlukan perbaikan secara berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa pada dasarnya telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas, memudahkan distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sea Induk belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pengawasan dalam proses pembangunan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan jalan belum merata dan kualitas hasil pembangunan masih bervariasi di beberapa wilayah desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah terlihat, terutama dalam tahap perencanaan melalui musyawarah desa dan keterlibatan sebagai tenaga kerja pada saat pelaksanaan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mencakup peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat agar pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dengan lebih mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek teknis perencanaan dan pengawasan pembangunan, perlu dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal dalam bentuk alokasi anggaran, pendampingan teknis, serta penguatan sistem pengawasan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif, tidak hanya dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang telah dibangun.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pembangunan infrastruktur desa dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui metode kuantitatif maupun studi perbandingan antarwilayah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Dirangga, E., Lengkong, F., & Kolondam, H. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).

Kodoatie, R. J. (2005). *Perencanaan pembangunan wilayah dan kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kogoya, M., Pati, A. B., & Rares, J. (2023). Implementasi program pembangunan infrastruktur di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny Jaya. *Agri-Sosioekonomi*, 19(2), 1091–1098.

Kusnadi. (2012). *Manajemen jalan dan transportasi*. Jakarta: Penerbit ABC.

Labaka, T. Y., Rares, J., & Kiyai, B. (2021). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(112).

Moloring, N., Rompas, Y., & Pombengi, J. (2024). Dampak kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kecamatan Ratatotok. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 30–38.

Mulyadi, D. (2012). *Manajemen infrastruktur dan pembangunan wilayah*. Jakarta: Penerbit XYZ.

Munandar. (2015). *Perencanaan jalan dan infrastruktur transportasi*. Jakarta: Penerbit Abadi.

Onnoa, R., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Perencanaan pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106).

Pono, H., Lengkong, F., & Palar, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(116).

Siagian, S. P. (2005). *Administrasi pembangunan: Suatu pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Smith, D. H., & Inkeles, A. (1966). *National development and the social sciences: Essays on the modernization theory*. New York: Praeger.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). London: Pearson.

*Corresponding author
E-mail addresses: avivamonintja06@gmail.com,



Tuju, F. V., Tulusan, F., & Palar, N. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Poopo Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110).

Watung, J., Rompas, W., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Kayuuwi I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(107).

WCED. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.

World Bank. (1994). *World development report 1994: Infrastructure for development*. Oxford: Oxford University Press.

Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 267.